



Hegemoni Kekuasaan Penguasa terhadap Pendidikan Bermoral dalam Tataran Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis

Gilang Sukma Permana

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: gsukma16@gmail.com

Irawan Irawan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: irawan@uinsgd.ac.id

Tedi Priatna

Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: tedi.priatna@uinsgd.ac.id

Abstract. *The world of education and teaching in this contemporary phase cannot be separated from hegemonic relations between policy stakeholders. Policymakers who will exist in 2022-2023 are involved with Gen X, individuals born in the 1965-1980 period. In its power as a policy maker, education is directed and expected to become a concrete step like a machine that produces moral human beings. Morals in education are intended so that students can have the values of love, love each other within the limits of norms and have commendable ethics both in religious and cultural values. The problem in this research concerns contemporary issues regarding the hegemony of power over the moral educational process in the view of the philosophy of science at the ontological, epistemological and axiological levels. The aim of this research is to reveal the hegemony of power over the moral educational process in the view of the philosophy of science at the ontological, epistemological and axiological levels. The method used in this research is qualitative with a philosophy of science approach. From the perspective of the philosophy of science, the hegemony of power over moral education goes through three phases; ontological as a search for the nature of what and why of moral education; epistemological as a review of the hegemony of power towards moral education in the philosophical aspect and axiological as a review of the usefulness of aspects of the hegemony of power towards moral education. The results of the research show that there is a hegemony of rulers who have power which is marked by the symbol of the Minister of Religion as the ruler of Gen With this moral education, educators will continue to be wise and wise in their lives, because the function of Islamic education in Indonesia is to improve and teach morals to their students so that they become human beings who have moral values.*

Keywords: *Education, Government, Hegemony, Morals*

Abstrak. Dunia pendidikan dan pengajaran dalam fase kontemporer ini tidak bisa terlepas dari relasi hegemoni antar pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan yang eksis di tahun 2022-2023 dilibati oleh Gen X, individu yang lahir dalam rentan waktu 1965-1980. Dalam kuasanya sebagai pemangku kebijakan, pendidikan diarahkan dan diharapkan menjadi langkah konkrit layaknya mesin pencetak insan yang bermoral. Moral dalam pendidikan dimaksudkan agar pelajar bisa memiliki nilai-nilai cinta kasih, saling menyayangi satu sama lain dalam batas norma dan memiliki etika yang terpuji baik dalam nilai agama maupun budaya. Masalah dalam penelitian ini mempermasalahkan isu-isu kontemporer mengenai hegemoni kekuasaan terhadap proses pendidikan yang bermoral dalam pandangan filsafat ilmu dalam tataran ontologis, epistemologis dan aksiologis. Tujuan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengungkapan hegemoni kekuasaan terhadap proses pendidikan yang bermoral dalam pandangan filsafat ilmu dalam tataran ontologis, epistemologis dan aksiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan filsafat ilmu. Dalam sudut pandang filsafat ilmu, hegemoni kekuasaan terhadap moral pendidikan melewati tiga fase; ontologis sebagai pencarian hakikat apa dan mengapa terhadap pendidikan yang bermoral; epistemologis sebagai tinjauan hegemoni kekuasaan terhadap pendidikan moral dalam aspek filosofis dan aksiologis sebagai tinjauan kebermanfaatan aspek hegemoni penguasa terhadap pendidikan yang bermoral. Hasil penelitian menunjukkan adanya hegemoni penguasa yang memiliki kekuasaan yang ditandai dengan symbol menteri Agama sebagai penguasa Gen X yang lahir pada periode 1965-1980, pendidikan bermoral terus dipertahankan oleh penguasa yang diwariskan dari pendahukunya sebagai sebuah nilai yang sakral. Dengan adanya pendidikan bermoral ini maka pendidik akan terus menjadi bijak dan arif dalam

kehidupannya, karena dalam fungsi pendidikan Islam di Indonesia adalah memperbaiki dan mengajarkan moral kepada peserta didiknya agar menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai moral.

Kata Kunci: Hegemoni, Moral, Pendidikan, Penguasa

PENDAHULUAN

Kompleksitas pendidikan khususnya yang berbasis agama Islam; tentunya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang menyangkut kebijaksanaan yang akan berlaku di sebuah system kuasa. Dalam system kuasa yang berlaku, terdapat pemangku kebijakan yang dinamakan *stake holder*. Dengan adanya pemangku kebijakan ini, arah dunia pendidikan akan berjalan sesuai “kehendak” pemangku jabatan yang berhasil memasukkan ideologi-ideologi pemikirannya dalam aturan-aturan formal yang diberlakukan.

Ruang kuasa yang dimiliki oleh setiap individu dalam tataran relasi kepentingan akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah pendukung pro dan kontra dalam sebuah forum. Kepentingan dalam dunia pendidikan tidak berbeda dengan kepentingan lainnya yang harus berebut ideologi tertentu agar kesepakatan yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh pemangku kebijakan.

Catatan yang terdapat dalam media masa (Kompas) menyebutkan bahwa adanya keterlibatan Gen X dalam pertarungan kuasa (Kurnia Yunita Rahayu, 2023). Fakta lainnya bahwa menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas yang masuk dalam tataran Gen X; lahir Rembang, Jawa Tengah pada 4 Januari 1975 (Kemenag, 2023); menambah kuat persoalan bahwa adanya hegemoni yang berlangsung dalam kepentingan pendidikan yang bermoral. Gen X sendiri dikatakan sebagai manusia yang terlahir dalam jangka tahun 1965-1980 (Denny Bristow, 2011, p. 78).

Pendidikan agama Islam memiliki peran penting sebagai metode untuk membuat peserta didik menjadi bermoral dan beretika (Sinta Rahmadania, 2021, p. 226), walau demikian tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keluarga menjadi salah satu peran terpenting untuk menjaga pendidikan bermoral ini tidak luntur dalam relung jiwa peserta didik dalam kehidupannya. Tidak mengenyampingkan aspek keluarga, mustahil dipungkiri bahwa pendidikan agama Islam mengajarkan cinta kasih, etika dan moral dalam penyebaran pengajarannya.

Pendidik yang mengimplementasikan segala hal yang terkait pembelajaran yang bermoral, hal tersebut tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh otoritas yang sudah dibuat oleh para pejabat di parlemen, karena semua aturan-aturan yang dijalankan oleh pendidik sesuai dengan “silabus” yang telah disepakati oleh pemangku kebijakan. Layaknya aturan mengenai

madrasah, Ketika aturannya sudah ada maka wajib dilaksanakan (Sidiq & Widyawati, 2019, pp. 55-56). Urusan pendidikan agama Islam, pejabat yang memegang peranan besar untuk bisa disebar luaskan adalah Menteri Agama; yang mana menteri Agama merupakan Gen X.

Hegemoni urusan moral yang dijadikan acuan pendidikan berbasis Agama Islam merupakan hal-hal yang menyangkut etika, kasih sayang dan penanaman cinta (Erviana, 2021, p. 1). Karena moral yang terkandung dalam pengajaran tidak akan terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan norma, budaya dan agama.

Moral-moral yang dimiliki dunia Barat mengedepankan bagaimana hubungan-hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan mengesampingkan aspek *transenden*, walau demikian Lawrence Kohlberg memberikan pandangan bahwa moral melibatkan hati nurani (Kuswandi, 2020). Bagi umat Islam, moral-moral dan budi pekerti tidak bisa dianggap bebas seperti dunia Barat yang menganggap hati Nurani sebagai sumber moral, namun bagi umat Islam moral harus sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis (Aradika, Nurwahidin, & Sudjarwo, 2022).

Konsep pendidikan Islam tentang moral, bagi setiap subjek-subjek yang didogma diwajibkan berbuat baik dan sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Dogma yang diajarkan dan disebarluaskan menekankan aspek bimbingan Rohani, akal budi, aspek social yang sejalan dengan hukum syariat agar subjek tersebut dicetak sebagai insan yang sesuai dengan arah dan maksud yang tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis (Abidin, 2021, p. 1).

Dengan fakta dan data yang tertera sebelumnya, maka diketahui bahwa Gen X pada saat ini memiliki peranpenting terhadap keputusan yang diambil. Contoh konkritnya adalah pengangkatan menteri Agama yang masuk dalam kriteria Gen X yang lahir dalam periode 1965-1980. Menurut pandangan hegemoni, seseorang atau kelompok bisa mendominasi dan memberikan pengaruh kepada khalayak banyak dalam aspek ideologi (Jannah, 2019, p. 5). Sehingga subjek-subjek atau agen pembuat pengekalan ideologi tersebut menjadi superior.

Dalam pandangan filsafat ilmu, secara ontologis, epistemologis dan aksiologis hegemoni tersebut tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya kecuali melewati tiga fase tersebut. Dengan demikian, pengaruh Gen X dalam turut ikut sertanya dalam perumusan nilai bermoral dalam dunia pendidikan bisa dijalankan sesuai dengan perumusan para pemangku kebijakan. Hal ini sangat krusial dan tingkat urgensinya dipandang sentral. Karena di dalam pendidikan Islam yang bermoral, dapat ditinjau poin-poin penting yang disisipkan oleh Gen X pada mekanisme aturan main para pendidik mendidik siswanya agar menjadi individu yang bermoral. Sebagai contoh sederhananya, poin tentang nasionalisme, sikap cinta tanah air dan menjunjung tinggi toleransi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kajian pustaka dan dipadukan dengan analisis kritis. Metode kajian pustaka ini menekankan literatur yang ada seperti jurnal, surat keputusan, buku, berita dan segala yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Analisis kritis bertujuan untuk langkah konkrit mendadarkan masalah yang menajdi objek penelitian, sehingga dengan adanya analisis kritis maka penelitian ini bersifat aktual dan terbaharukan, jauh dari reduksi penelitian yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Gen X sebagai pihak penghegemoni seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa mengambil contoh bahwa menteri Agama masuk dalam tataran Gen X. Menurut Oktariani dkk (2017) bahwa Gen X memiliki ekspektasi kerja sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, ekspektasi yang dimiliki oleh Gen X merupakan pemberian otoritas pekerjaan yang melibatkan anggota tim untuk membuat sesuatu, sehingga adanya keputusan yang diselsaikan secara bersama-sama; generasi ini mendukung dan mendengarkan satu sama lain dalam ruang musyawarah, sehingga pengembangan diri yang dilakukan oleh Gen X lebih terstruktur.

Salah satu data yang bisa diambil yaitu dalam (Kasman, 2022) adanya dialog antara Kementerian Agama dengan salah satu narasumber yang bernama Dr. Taufik, S.Ag., M.Ag; dalam dialognya Taufik memberikan penjabaran mengenai tugas dan fungsi pendidikan Islam yang diantaranya menjadikan manusia cerdas, bermoral, berakhlak, untuk mengantarkan kepada sifat insaniyah dan ilahiyah. Pernyataan tersebut tidak mungkin bisa keluar dari dirinya kecuali ada instruksi dari pihak yang berkuasa dalam jajaran kementerian agama. Kembali lagi pada poin Gen X, tidak ada yang bisa mengesahkan sebuah tujuan dan fungsi tertentu yang menyangkut urusan pendidikan Islam sebagai metode untuk membuat manusia bermoral dan lain sebagainya kecuali pimpinan yang ada di atas Taufik, pimpinan tersebut lagi-lagi berasal dari Gen X (*red. Menteri*).

Adapun data yang cukup valid yang tertulis dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/255/2007 tentang tata tertib mahasiswa, tertera poin yang berbunyi “bahwa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat tata tertib mahasiswa PTAI secara nasional”; dilarang Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan; Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan

ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.

Dari data-data yang tertera sebelumnya, kementerian Agama berusaha untuk menjadikan dunia pendidikan islam sebagai sarana menciptakan manusia-manusia yang bermoral. Dengan dibuatnya aturan-aturan tersebut maka kementerian Agama yang saat ini dipimpin oleh Gen X dan tidak mengubah apapun seperti yang tertera di dalam surat tata tertib untuk mahasiswa dari KEMENAG tahun 2007, maka sebagai perwakilan Gen X, menteri Agama dianggap terus menjalankan hegemoni yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga stabilitas moral di dunia pendidikan, khususnya pendidikan berbasis islam.

Contoh penekanan nilai moral di dunia pendidikan tertera pada poin SK yang dicantumkan sebelumnya: “Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya”. Poin-poin yang tertera di dalam SK tersebut sangat gamblang menyebutkan moral di dalamnya; hingga pada saat ini poin tersebut tidak terganti dengan kalimat atau padanan kata yang serupa, namun masih dipertahankan. Sehingga Gen X yang pada saat ini menjabat sebagai pemangku kepentingan, secara tidak langsung melestarikan nilai-nilai moral yang ingin dipertahankan sebagai sebuah nilai yang sakral dan tidak dapat digantikan dengan yang lain.

Dengan demikian bahwa jelas terdapat nilai-nilai hegemoni Gen X yang terdapat di struktur pendidikan Islam, hegemoni ideologis yang diturunkan secara system pemerintahan merupakan pendorominasian mutlak, karena pendidik tidak bisa berketik dengan adanya surat legal yang dibuat oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini ketua kementerian Agama berada di posisi Gen X. Sebagai langkah awal pendidik menjadi mesin penyebaran massif pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai moral ke penjuru Nusantara, maka diberlakukanlah pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai moralitas, baik buruk dan arifnya manusia dalam wadah yang dinamakan system pengajaran.

Pendidikan Bermoral dalam Tinjauan Filosofi

Fase pertama untuk menemukan dasar-dasar filosofis yang selanjutnya akan disepakati oleh individu yang terpengaruh, yaitu fase ontologis. Seringkali ontologis ini digumamkan dengan aspek metafisik (Kattsoff, 2004). Dalam masa kontemporer ini, perguruan tinggi

berbasis agama belum bisa membedakan Pendidikan ala Islam dengan Sekuler yang berkembang hingga saat ini (Arifin, 2014). Namun, moral dalam padanan kata Bahasa Arab bisa disandingkan dengan kata *akhlaq*, kata *akhlaq* sendiri memiliki makna perangai, nilai moral dan sebagainya (KBBI, 2005). Dalam nilai-nilai moral yang terdapat dalam diri manusia, mewujudkan cinta dan kasih dari manifestasi lainnya yang bersumber dari moral. Cinta menurut pandangan Aristoteles dalam (Rahmatullah, 2021) bahwa cinta merupakan sebuah gerakan yang dihasilkan dari olah gerak jantung yang nantinya akan bergerak dan tumbuh; setelah dewasa perasaan tersebut akan berubah menjadi sayang dan apabila kegigihan rasa sayang ini bertambah-tambah maka akan berubah menjadi dorongan dan keinginan. Begitu dengan moral, nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam diri akan merubah kemauan yang jelek menjadi kemauan yang bernilai baik. Maka pendidikan yang bermoral merupakan jalan untuk menjadikan diri sebagai manusia yang penuh dengan kegembiraan karena moral yang dimilikinya bertransformasi menjadi nilai kebaikan dan nilai cinta yang sensitif akan kebaikan-kebaikan hidup.

Ragam Bentuk Hasil Pendidikan Bermoral

Langkah selanjutnya masuk dalam ranah epistemologis. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, moral merupakan hal yang luhur, karena moral mengajarkan arti kebijaksanaan dan cinta dalam eksistensinya dalam diri manusia. Dengan nilai-nilai moral yang dilakukan oleh subjek, obsesi dirinya untuk menjadi lebih baik akan muncul sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Aristoteles. Mencatat poin sebelumnya, bahwa dalam SK KEMENAG memberikan pandangan tentang tata tertib dan aturan bagi mahasiswa yang dirancang untuk menjaga moral mahasiswanya.

“Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.”

Dalam poin tersebut, pejabat kepentingan memberikan *guideline* bagi para mahasiswa agar berperilaku yang tidak mencoreng nilai-nilai norma yang ada. Poin tersebut mengatakan bahwa mahasiswa dilarang *Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menyimpan, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina...*; hal tersebut memberikan manfaat bagi dua kubu, yang pertama ada di kubu pejabat kepentingan yang kedua ada dalam tataran mahasiswa.

Sekilas aturan-aturan tersebut dibuat sebagai hasil pendidikan bermoral, karena jika tidak bermoral tentunya poin tersebut tidak akan dicantumkan oleh pemangku kebijakan sebagai aturan yang mutlak diberikan kepada mahasiswa, jika pendidikan bermoral tidak berlaku, maka mahasiswa banyak yang akan mencuri, menyelewengkan nilai, memanipulasi anggaran dana dan lain sebagainya.

Dengan adanya aturan tersebut maka mahasiswa diharapkan sebagai pionir manusia yang bermoral, beretika dan hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat, walaupun masih terhegemoni kekuasaan Gen X dalam kehidupannya, namun hegemoni tersebut bisa dijalani dengan seksama oleh Gen manapun, bukan hanya berlaku kepada suatu kelompok Gen tertentu.

Nilai Manfaat Pendidikan Bermoral

Tahap selanjutnya terdapat tahap aksiologis. Pada tahap ini kebermanfaatn pendidikan bermoral memiliki nilai final yang berfungsi memberikan keleluasaan bagi pendidik menjadikan didikannya sebagai manusia yang bermoral. Moral yang diajarkan pendidik kepada yang dididik sesuai dengan pengalaman moral pendidik, karena sapek pengalaman terhadap moral yang beragam tidak akan mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Walaupun berbeda, nilai-nilai moral yang diajarkan tidak akan jauh berbeda dengan garis besar moral itu sendiri.

Bagi pendidik di dunia pendidikan islam, tentunya nilai-nilai moral yang diajarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam yang dijadikan sumber rujukan utama kehidupan bermasyarakat. Posisi pendidikan bermoral dalam pendidikan agama islam sangat serasi dengan *rules* yang dimiliki oleh islam tersendiri. Batas halal-haram, mubah-makruh dan lain sebagainya telah diartur dalam ilmi fiqih, dan moral diatur oleh ilmu tassawuf.

Selain itu, manfaat pendidikan bermoral menjadikan diri pendidik terus belajar mengenai moral dalam kehidupan, menjadikan pendidik lebih arif dari sebelumnya. Terlepas adanya hegemoni dari pemangku kebijakan terhadap aturan wajib menyampaikan nilai moral, pendidik akan lebih maju dengan nilai moral yang dimilikinya. Pendidikan yang bermoral ini menandakan suksesnya ungkapan adab di atas ilmu, karena nilai moral jauh lebih berguna dan diterima dalam kehidupan masyarakat dibandingkan ilmu yang dikhawatirkan menimbulkan pikiran dan sikap yang angkuh.

KESIMPULAN

Dunia pendidikan merupakan wadah sekaligus mesin yang berfungsi menjadikan didikan seorang pendidik menjadi manusia yang bermoral. Di dalam akses pemoralan objek, pendidik selaku subjek perlu memerhatikan aturan main yang ada dalam dunia pendidikan islam, dalam hal ini pendidik berpedoman kepada aturan yang ditulis dan dikeluarkan oleh pejabat kepentingan dari lingkup kementerian agama. Dalam peraturan yang diberikan oleh kementerian, posisi Gen X mendominasi atau dalam kata lain menghegemoni kekuatan keputusan yang nantinya akan menjadi pedoman pendidik mendidik peserta didik menjadi manusia yang bermoral lewat pendidikan islam. Dalam keputusan pendidikan moral yang disebarluaskan, tahap yang terkait dengan filsafat ilmu bahwa pendidikan yang bermoral harus melewati tiga tahapan filsafat ilmu agar tidak menimbulkan kerancuan berpikir, fase-fase tersebut yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dengan adanya tahapan dalam fase tersebut, meskipun terhegemoni oleh kekuatan Gen X, tidak menutup kemungkinan bahwa ajaran moral yang terdapat dalam pendidikan islam tidak akan ditentang oleh generasi berikutnya. Kesuksesan pendidikan moral ini menandakan bahwa ungkapan adab di atas ilmu bisa terwujud dengan adanya moral di dalam diri manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2021). Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 57.
- Aradika, M. K., Nurwahidin, M., & Sudjarwo. (2022). Konsep pendidikan karakter anak dalam perspektif filsafat ilmu. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2622.
- Arifin, Z. (2014). Pendidikan Islam dalam perspektif filsafat ilmu. *Ta'dib*, 129-130.
- Bristow, D. A., Denny. (2011). A cross-generational comparison of motivational factors in a sales career among Gen-X and Gen-Y college students. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 78.
- Erviana, V. Y. (2021). Penanganan dekadensi moral melalui penerapan karakter cinta damai dan nasionalisme. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 1.
- Jannah, N. (2019). Realitas pesantren dan kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci. *Journal of Islamic Education Research*, 5.
- Kasman. (2022, September 14). Dialog interaktif, Dr. Taufik, M.Ag. Tujuan pendidikan Islam tugas dan fungsinya. Retrieved from Kemenag Sulteng: https://sulteng.kemenag.go.id/berita_v2/detail/dialog-interaktif-dr-taufik-mag-tujuan-pendidikan-islam-tugas-dan-fungsinya

- Kattsoff, L. O. (2004). Pengantar filsafat. (S. Soemargono, Trans.) Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- KBBI. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Kuswandi, I. (2020). Tahapan pengembangan moral: Perspektif Barat dan Islam (Telaah terhadap gagasan Thomas Lickona, Lawrence Kohlberg dan Al-Qur'an). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 159.
- Oktariani, D., Hubeis, A. V., & Sukandar, D. (2017). Kepuasan kerja generasi X dan generasi Y terhadap komitmen kerja di Bank Mandiri Palembang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 16.
- Rahayu, K. Y., I. B. (2023, Agustus 25). Pemilih Golkar dari Gen Z menurun, Gen X di PKS dan PPP meningkat. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/pemilih-golkar-dari-gen-z-menurun-gen-x-di-pks-dan-ppp-meningkat>
- Rahmadania, S., & Sinta, A. J. (2021). Peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat. *Jurnal Edumaspul*, 226.
- Rahmatullah, A. S. (2021). Pendidikan cinta kasih anak dalam perspektif filsafat ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 74.
- RI, M. A. (2023, Oktober 28). Menteri Agama RI. Retrieved from Menteri Agama RI: <https://kemenag.go.id/artikel/menteri-agama>
- Sidiq, U., & Widyawati, W. (2019). Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Ponorogo: CV. Nata Karya.